

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Pelaku UMKM Di Kabupaten Kubu Raya

^{1*}Wan Feiryadi Faisal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*e-mail: e2071231003@student.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Diterima : 06-10-2025
Revisi : 14-11-2025
Dipublikasikan : 26-12-2025

Kata Kunci:

Efektivitas, Efisien, Dampak, Keberlanjutan

Keywords:

Effectiveness, Efficiency, Impact, Sustainability

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala utama dalam mendorong inovasi, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Meskipun kebijakan daerah mendukung pengembangan UMKM, implementasi di lapangan masih terbatas oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya efektivitas anggaran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan UMKM melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama lima bulan pada Dinas Koperasi UKM dan tiga kecamatan. Temuan menunjukkan bahwa 92% UMKM adalah usaha mikro yang didominasi sektor perdagangan, jasa, dan produksi. Pelatihan struktural mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%, namun tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan kurangnya pendampingan masih menghambat akses pembiayaan dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multisektor dan transparansi anggaran guna menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Abstract

This article aims to examine how the youth social movement within the Kelompok Peduli Mangrove Muda (KPM) contributes to the preservation of the World Cleanup Day Indonesia (WCDI) program. This movement is a tangible action reflecting environmental concern, predominantly driven by youth participation, particularly in the coastal areas of Pamekasan Regency. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the youth social movement in KPM plays a significant role in raising public awareness in coastal communities regarding waste management, environmental restoration, and environmental education through the WCDI program. Through collaboration with communities, village governments, and educational institutions, this program is able to run sustainably and provide both social and ecological impact.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang berperan penting dalam pemerataan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2025), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,7%, dengan kemampuan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Peran dominan ini menjadikan UMKM sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global (Yolanda & Hasanah, 2024). Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemudahan akses terhadap pembiayaan formal yang menjadi kunci keberlanjutan usaha.

Hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal, terutama pada skala mikro. Banyak pelaku usaha mengalami kendala berupa persyaratan administrasi yang rumit, minimnya agunan, serta rendahnya literasi keuangan dan manajerial (Saleh et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM cenderung mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang berisiko menghambat pertumbuhan usaha (Tambunan et al., 2022). Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), dan Pembiayaan Syariah, tingkat penyerapan dan efektivitas program tersebut masih belum merata di berbagai daerah.

Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar dan basis UMKM yang kuat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM (2024), terdapat 21.234 unit UMKM aktif di wilayah ini, dengan mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Pemerintah daerah turut mendukung pengembangan sektor ini melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp394,9 miliar kepada 5.462 debitur, di mana 88% merupakan pelaku usaha mikro (DJPb, 2024). Meskipun capaian tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan modal produktif, berbagai kendala di lapangan masih muncul, seperti ketidaksesuaian program pembiayaan

dengan kebutuhan sektor usaha, minimnya pendampingan pascapenyalaran, serta lemahnya sinergi antarinstansi pelaksana (Sakbir, 2020).

Untuk memperkuat sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM yang menegaskan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, dan absennya sistem evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kebijakan (Kartani et al., 2024). Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pembiayaan perlu dikaji secara empiris agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di daerah.

Secara teoretis, evaluasi kebijakan publik menekankan pentingnya hubungan antara tujuan kebijakan, proses implementasi, dan dampak terhadap kelompok sasaran (Anderson, 2006; Durlak & DuPre, 2008; Mavrot et al., 2019). Evaluasi yang baik tidak hanya menilai output administratif seperti jumlah penerima kredit, tetapi juga outcome berupa peningkatan akses, produktivitas, dan kemandirian pelaku usaha (Bakare et al., 2024; Zhu et al., 2021). Pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah efektif dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif, terutama bagi usaha mikro yang menjadi mayoritas pelaku ekonomi daerah.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan akses pembiayaan pelaku UMKM melalui tiga aspek utama: efektivitas program pembiayaan (KUR), mekanisme implementasi kebijakan di tingkat daerah, dan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah serta menjadi dasar perumusan strategi pembiayaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika kebijakan, interaksi antaraktor, serta kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi implementasi program (Creswell, 2014). Model studi kasus digunakan untuk menggali konteks spesifik kebijakan daerah pada lokasi tertentu dengan intensitas intervensi tinggi (Yin, 2017).

Pendekatan evaluasi dalam penelitian ini juga mengadopsi prinsip Utilization-Focused Evaluation (UFE) sebagaimana dikemukakan oleh Patton (Patton, 1997). Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi harus dirancang dan dilaksanakan dengan orientasi pada penggunaan hasil oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Artinya, fokus evaluasi tidak hanya pada pengukuran capaian kebijakan, tetapi juga pada bagaimana hasil evaluasi dapat langsung dimanfaatkan untuk memperbaiki intervensi kebijakan secara praktis.

Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek: (1) efektivitas program pembiayaan UMKM, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) kualitas pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah; dan (3) sejauh mana dukungan kebijakan mendukung inovasi usaha mikro di wilayah tersebut.

Populasi penelitian mencakup seluruh aktor strategis dalam ekosistem kebijakan UMKM, yaitu aparatur Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, lembaga keuangan penyalur KUR, serta pelaku UMKM yang aktif di tiga kecamatan dengan jumlah unit usaha tertinggi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam kebijakan yang diteliti. Proses penentuan jumlah informan dilakukan hingga tercapai titik saturasi data, yakni saat informasi yang diperoleh mulai repetitif dan tidak memberikan temuan baru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali secara komprehensif persepsi, pengalaman, serta evaluasi kebijakan dari pejabat dinas terkait dan pelaku UMKM. Kedua, observasi partisipatif dilaksanakan secara

langsung di lokasi usaha dan kantor pemerintahan guna mengamati praktik implementasi kebijakan serta interaksi yang terjadi antaraktor yang terlibat. Ketiga, dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder melalui analisis terhadap berbagai dokumen, seperti peraturan daerah, laporan kinerja instansi, data statistik, serta arsip pelaksanaan program yang relevan dengan kebijakan pemberdayaan dan pembiayaan UMKM di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berperan dalam menginterpretasikan data melalui interaksi langsung dengan responden dan dokumen (Maher et al., 2018) (Moleong, 2019). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, baik pada sumber maupun metode, untuk meningkatkan keabsahan temuan (Campbell et al., 2020). Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik-induktif, yaitu proses identifikasi tema yang muncul dari data lapangan melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan berbasis pola. Analisis tidak semata berdasarkan frekuensi, tetapi juga memperhatikan intensitas, konteks, dan keterkaitan antarfenomena. Proses ini memungkinkan peneliti memahami kompleksitas implementasi kebijakan secara menyeluruh dan sistemik.

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, mencakup seluruh tahapan mulai dari desain studi, pengumpulan data, hingga interpretasi dan penyusunan rekomendasi. Lokasi penelitian dipusatkan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan tiga kecamatan yang dipilih berdasarkan konsentrasi UMKM tertinggi. Dengan kombinasi desain kualitatif, pemilihan informan strategis, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini bertujuan menghasilkan evaluasi yang reflektif dan kontekstual terhadap kebijakan daerah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM Kabupaten Kubu Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2024 mencapai 21.234 unit, dengan dominasi 92% usaha mikro.

Sektor utama meliputi perdagangan (52%), jasa (27%), dan produksi rumah tangga (21%). Struktur ini mencerminkan karakter ekonomi daerah yang masih bergantung pada usaha skala kecil dengan tingkat produktivitas dan kapasitas inovasi yang terbatas.

Kondisi ini memperkuat analisis Anderson (2006) bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian instrumen kebijakan terhadap struktur sosial-ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, desain kebijakan yang menyamaratakan seluruh kategori UMKM cenderung tidak efektif ketika mayoritas penerima adalah pelaku usaha mikro dengan keterbatasan literasi dan legalitas.

Akses Pembiayaan melalui Program KUR

Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya menempati peringkat keempat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024, dengan total nilai sebesar Rp 394,9 miliar yang disalurkan kepada 5.462 debitur. Namun, 88% penerima KUR merupakan pelaku usaha mikro, yang sering kali menghadapi kendala administratif, kurangnya legalitas usaha, dan rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan program pembiayaan belum secara otomatis menjamin keterjangkauan. Studi Gupta, (2025) di India yang mengidentifikasi bahwa literasi keuangan rendah dan tidak adanya pendampingan menjadi faktor penghambat utama keberhasilan program kredit mikro. Di Kubu Raya, ketimpangan akses ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan KUR belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM pasca-pembiayaan.

Tantangan Implementasi Kebijakan Daerah

Meskipun secara normatif telah tersedia Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembinaan sangat terbatas, koordinasi antarorganisasi perangkat

daerah (OPD) belum sinergis, serta tidak tersedia sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan yang memadai.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Kartani et al. (2024) serta Mindarti dan Muzaqi (2020), yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menambahkan bahwa bukan hanya koordinasi yang menjadi tantangan, melainkan juga rendahnya kompetensi teknis pelaksana dan kurangnya pelibatan pelaku UMKM dalam tahap perencanaan dan umpan balik kebijakan.

Dampak Program Pelatihan terhadap Produktivitas

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dirancang secara terstruktur mampu meningkatkan produktivitas UMKM hingga 30%, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Namun, pelatihan tersebut hanya menjangkau sebagian kecil pelaku UMKM, dan tidak diikuti dengan mekanisme pendampingan berkelanjutan.

Maxwell et al. (2024) menegaskan bahwa pelatihan hanya efektif jika diintegrasikan dengan sistem mentoring dan monitoring berjangka panjang. Hal serupa ditegaskan oleh Wibowo et al. (2024), yang menekankan pentingnya digital onboarding dan pelatihan berbasis aplikasi sebagai strategi akseleratif bagi UMKM di ASEAN. Dengan demikian, keberhasilan pelatihan di Kubu Raya bersifat temporer dan belum membentuk transformasi perilaku usaha secara sistemik. Diperlukan desain pelatihan berbasis siklus pembelajaran yang iteratif, disertai integrasi teknologi dan insentif partisipasi.

Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan

Partisipasi pelaku UMKM dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan tergolong rendah. Mereka lebih sering diposisikan sebagai penerima program, bukan sebagai kontributor dalam proses perencanaan. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan tidak menjawab kebutuhan kontekstual pelaku usaha, seperti simplifikasi prosedur legalitas atau insentif digitalisasi.

Temuan ini konsisten dengan Oktaviani dan Ramadani (2025). yang menyebutkan bahwa partisipasi UMKM dalam kebijakan publik cenderung bersifat

simbolik. Penelitian ini menambahkan bahwa rendahnya partisipasi juga disebabkan oleh ketiadaan forum dialog yang permanen antara pelaku usaha dan pengambil kebijakan di tingkat daerah.

Di negara berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh Dorvlo et al. (2025) keberhasilan intervensi pemerintah dalam penguatan UMKM sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif dan kolaboratif dari pelaku usaha lokal. Oleh sebab itu, pembentukan forum konsultasi kebijakan berbasis asosiasi atau komunitas pelaku usaha perlu dipertimbangkan sebagai platform penghubung antara kebijakan dan kebutuhan nyata.

Posisi Temuan Penelitian terhadap Literatur Terdahulu

Untuk memperjelas kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan pengetahuan, Tabel 1 menyajikan perbandingan antara hasil penelitian dan studi-studi sebelumnya.

Tabel.1 Perbandingan antara Hasil Penelitian dan Studi-Studi Sebelumnya

Aspek	Temuan Penelitian Ini	Studi Sebelumnya
Akses Pembiayaan	KUR dominan mikro; kendala literasi & legalitas	Gupta (2025): Distribusi tidak merata
Implementasi Kebijakan	Terbatas anggaran; koordinasi lemah	Kartani et al. (2024): Koordinasi jadi hambatan utama
Pelatihan dan Produktivitas	Peningkatan 30%; tidak berkelanjutan	Widyastuti (2022): Efek jangka panjang perlu pendampingan
Partisipasi UMKM	Rendah; tidak substantif	Prasetyo (2019): Partisipasi hanya formalitas
Digitalisasi & Inovasi	Belum terintegrasi	Wibowo et al. (2024): Perlu onboarding digital

Implikasi Kebijakan

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh

kesiapan sistem pendukung, kapasitas pelaksana, dan keberlanjutan program. Evaluasi kebijakan yang tidak didasarkan pada kebutuhan nyata akan memperbesar risiko mismatch antara tujuan program dan realitas lapangan (Rossi et al., 2004).

SIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada aspek pembiayaan, pelatihan, dan inovasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa dominasi usaha mikro menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha skala kecil, karena 92% UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan legalitas. Program pembiayaan seperti KUR telah tersedia luas, namun belum sepenuhnya inklusif karena literasi keuangan dan kesiapan administrasi pelaku usaha masih rendah. Pelatihan dan pembinaan pemerintah daerah memang meningkatkan produktivitas hingga 30%, tetapi belum berkelanjutan akibat lemahnya sistem pendampingan, koordinasi antarprogram, dan monitoring. Partisipasi pelaku UMKM dalam perumusan kebijakan masih bersifat formalistik, sementara kebijakan daerah belum membentuk ekosistem inovatif karena minimnya integrasi antarinstansi, rendahnya adopsi teknologi digital, dan belum adanya forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Secara keseluruhan, kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kubu Raya belum efektif dan inklusif, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi pelaku usaha.

Hasil evaluasi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: peningkatan literasi keuangan berbasis komunitas dengan pendamping lokal; pengembangan sistem pendampingan berkelanjutan pascapembiayaan; penguatan ekosistem digital melalui kemitraan dengan fintech dan penyedia pelatihan teknologi; pembentukan forum konsultasi UMKM di tingkat kecamatan dan kabupaten; peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran program melalui publikasi data terbuka dan sistem monitoring digital; serta integrasi kebijakan UMKM ke dalam strategi

pembangunan ekonomi daerah. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal dan memperkuat UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2006). *Public Policymaking: An Introduction*. Houghton Mifflin.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>
- Bakare, O. A., Achumie, G. O., & Okeke, N. I. (2024). The impact of administrative efficiency on SME Growth and Sustainability. *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, 8(1), 126–138. <https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.8.1.0054>
- Campbell, R., Goodman-Williams, R., Feeney, H., & Fehler-Cabral, G. (2020). Assessing triangulation across methodologies, methods, and stakeholder groups: The joys, woes, and politics of interpreting convergent and divergent data. *American Journal of Evaluation*, 41(1), 125–144. <https://doi.org/10.1177/1098214018804195>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- DJPb. (2024). *Laporan kinerja DJPb tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi-3/transparansi-kinerja/laporan-kinerja.html>
- Dorvlo, S. Y., Mkandawire, E., Mentz-Coetzee, M., Dougill, A., Swanepoel, F., Emmambux, M. N., Boakye, A., Anim-Jnr, A. S., Lungu, N. S., Tchuwa, F., Kwapong, N. A., Isingizwe, F., Jokonya, O., Maina, J., du Toit, A., John, I., Mwanri, A. W., Mzumara, T. I., Holt, D., ... Quinn, C. H. (2025). Transforming African food systems: Perspectives from the Food Systems Network for Africa (FSNet-Africa). *Journal of Agriculture and Food Research*, 23, 102289. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.102289>

- Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: A Review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. *American Journal of Community Psychology*, 41(3–4), 327. <https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0>
- Gupta, S. (2025). Corporate social responsibility and sustainable development goals for a developed India @2047. *Journal of Sustainable Business*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s40991-025-00118-1>
- Kartani, Hayat, & Suyeno. (2024). Analysis of government policy on the development and empowerment of MSMEs through the lens of latest literature. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(1), 18–27. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21340>
- Maher, C., Hadfield, M., Hutchings, M., & de Eyto, A. (2018). Ensuring rigor in qualitative data analysis: A design research approach to coding combining nvivo with traditional material methods. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1609406918786362. <https://doi.org/10.1177/1609406918786362>
- Mavrot, C., Hadorn, S., & Sager, F. (2019). Mapping the mix: Linking instruments, settings and target groups in the study of policy mixes. *Research Policy*, 48(10), 103614. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.06.012>
- Maxwell, B., Káplár-Kodácsy, K., Hobson, A. J., & Hotham, E. (2024). Effective mentor training, education and development: A qualitative multilevel meta-synthesis. *International Journal of Mentoring and Coaching in Education*, 13(4), 422–440. <https://doi.org/10.1108/IJMCE-07-2023-0068>
- Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. (2020). Micro, small, and medium enterprises (msmes) empowerment through quadruple helix approach in Batu City. *Natapraja*, 8(2), 143–153. <https://doi.org/10.21831/jnp.v8i2.33363>
- Oktaviani, A., & Ramadani, T. (2025). Policy analysis of msme development as a support for economic development in sidoarjo regency. *MAP Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Patton, M. (1997). Utilization-focused evaluation: The new century text. *Evaluation and Program Planning*, 1, 123–126.

- Prasetyo, B. (2019). *Partisipasi pelaku UMKM dalam kebijakan ekonomi daerah*. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 101–115
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach (7th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sakbir, S. (2020). Pelaksanaan program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM) di kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato. *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 3(2), 77–91. <https://doi.org/10.31314/jppe.v3i2.918>
- Saleh, T., Hasudungan, B., & Nurdiana, D. (2025). Analisis dampak regulasi dan manajemen keuangan terhadap kemudahan akses kredit bagi UMKM. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3006–3024. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8463>
- Tambunan, E. C., Enuh, K., Ubaidullah, U., & Tamba, M. (2022). Capital access for micro small medium enterprises. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 148–158. <https://doi.org/10.46899/jeps.v10i2.375>
- Wibowo, B., Hamdi, E., Indradewa, R., & Munandar, A. (2024). Strategic formulation analysis for building digital-based training and coaching institutions in Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1609–1620. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i3.1089>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Zhu, G., Li, Z., & Xianxiang, X. (2021). Administrative approval reform and the quality of economic development. *China Economic Quarterly International*, 1(3), 258–270. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2021.09.002>